

KONTRIBUSI DAN PENGARUH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (2005-2014)

*THE CONTRIBUTION AND INFLUENCE OF REGIONAL RETRIBUTION TOWARDS
THE LOCAL OWN-RESOURCE REVENUE IN SOUTH MINAHASA DISTRICT
(STUDIES IN 2005-2014)*

Toar Waraney Lakoy, Daisy S.M Engka, Steeva Y.L Tumangkeng

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : waraneywazza@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu aspek utama dalam pembiayaan suatu daerah otonom. Salah satu unsur yang menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Minahasa Selatan yaitu retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dan pengaruh dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Minahasa Selatan. Untuk mencari seberapa besar kontribusi dan pengaruh dalam penelitian digunakan analisis kontribusi dan regresi sederhana. Hasilnya menunjukkan kontribusi dari retribusi daerah masuk pada kriteria sedang, retribusi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan hasil yang ada pemerintah di kabupaten minahasa selatan dapat menyusun strategi supaya dapat lebih menggali potensi retribusi yang ada, melakukan penyuluhan terhadap pentingnya kewajiban membayar retribusi yang ada kepada masyarakat, menindak tegas pelanggar pemungut retribusi, dan meningkatkan kualitas aparat daerah dan pelayanan terhadap publik.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah.

ABSTRACT

Local Own-resource Revenue (PAD) is one of the main aspect in budgeting an autonomous region. One of the key factor which support the Local Own-resource Revenue (PAD) in South Minahasa is regional retribution. This research has a purpose to define the contribution and impact of regional retribution towards the Local Own-resource Revenue itself in South Minahasa District. To analyze how significant the contribution and impact, in this research, the researcher uses simple regression. The result shows that the contribution of regional distribution is on the average area, retribution itself does not have significant influence towards the Local Own-resource Revenue. With this result, the South Minahasa government may set the strategy to explore the potency of the current retribution, to spread the useful information for all the society about the importance of paying the retribution, to emphasize the punishment for all the trespasser, and to increase the public service and quality of local authorities.

Key Words : Local Own-resource Revenue (PAD), Regional Retribution

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah khususnya daerah kota/kabupaten merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata [6].

Melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. [5] otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. . [11] Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) beberapa pos harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. [5].

Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat sumber, yaitu: [3]

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang-orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. [1] Retribusi daerah merupakan pemungutan yang dipungut pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan adalah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok di atas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu

Salah satu pendapatan daerah yang paling besar adalah retribusi. Selain merupakan salah satu pendapatan paling besar, dari retribusi memberikan pengaruh dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerah. [11], [12]

Sejak Minahasa Selatan resmi menjadi daerah Otonom pada tanggal 4 Agustus 2003 semua masalah pemerintahan telah diurus sendiri begitu juga dengan masalah keuangannya. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah, data yang di ambil dari tahun 2005 sampai 2014 dapat kita lihat pada tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2005-2014

Tahun	Realisasi	Target
2005	1.515.291.258	1.667.605.000,00
2006	1.276.200.109	1.874.500.000,00
2007	2.517.921.023,00	2.745.080.000,00
2008	1.585.707.509,00	1.906.936.000,00
2009	2.145.302.036,00	2.322.835.600,00
2010	1.139.081.686,00	2.065.075.000,00
2011	1.398.222.820,00	2.421.800.000,00
2012	794.163.451,00*	350.000.000,00
2013	1.896.320.372,00	3.331.415.000,00
2014	1.989.213.244,00	3.051.415.000,00

Sumber: *DISPENDA Kab Minahasa Selatan (2015)*

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat realisasi dan target penerimaan retribusi daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 target retribusi daerah mencapai 1.667.605.000 rupiah, tahun 2006 dan 2007 target retribusi naik berturut turut menjadi 1.874.500.000 rupiah dan 2.745.080.000 rupiah, pada tahun 2008 target retribusi mengalami penurunan menjadi 1.906.936.000 rupiah, tahun 2009 target retribusi naik menjadi 2.322.835.600 rupiah, tahun 2010 target retribusi turun 2.065.075.000 rupiah dan naik kembali pada tahun 2011 menjadi 2.421.800.000, pada tahun 2012 hanya 350.000.000 dikarenakan adanya pembahasan perda retribusi terbaru, pada tahun 2013 target retribusi naik lagi menjadi 3.331.415.000 rupiah, dan turun di tahun 2014 menjadi 3.051.415.000 rupiah. Sedangkan pada realisasinya tahun 2005 mencapai 1.515.291.258 rupiah, pada tahun 2006 turun menjadi 1.276.200.109, pada tahun 2007 realisasinya mencapai 2.517.921.023 rupiah, tahun 2008 retribusi turun menjadi 1.585.707.509 rupiah, naik kembali di tahun 2009 menjadi 2.145.302.036 rupiah, tahun 2010 retribusi kembali turun menjadi 1.139.081.686 rupih, tahun 2011 retribusi menjadi 1.398.222.820 rupiah, di tahun 2012 ada penambahan 40 persen dari jumlah realisasi retribusi dari tahun sebelumnya dikarenakan untuk kepentingan penelitian sehingga realisasi retribusi mencapai 794.163.451 rupiah, ditahun 2013 retribusi naik menjadi 1.896.320.372, dan naik kembali di tahun 2014 menjadi 1.989.213.244 rupiah.

Tabel 2. Rekapitulasi Realisasi Retibusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2005-2014

Tahun	Retribusi	Pad
2005	1.515.291.258,00	3.697.691.164,00
2006	1.276.200.109,00	4.100.530.604,00
2007	2.517.921.023,00	5.567.377.399,00
2008	1.585.707.509,00	4.209.053.938,00
2009	2.145.302.036,00	6.598.234.717,00
2010	1.139.081.686,00	5.594.269.278,00
2011	1.398.222.820,00	8.327.631.816,00
2012	794.163.451,00 *	10.620.087.945,00
2013	1.896.320.372,00	14.406.092.809,00
2014	1.989.213.244,00	26.137.234.620,00

Sumber: DISPENDA Kab.MINSEL 2015

Dari tabel diatas yang akan dijelaskan hanya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja karena realisasi retribusi sudah di jelaskan menggunakan tabel sebelumnya. Di tahun 2005 realisasi PAD mencapai 3.697.691.164 rupiah, tahun 2006 naik menjadi 4.100.530.604 rupiah, di tahun 2007 naik kembali menjadi 5.567.377.399, pada tahun 2008 realisasi PAD turun menjadi 4.209.053.938 rupiah, tahun 2009 realisasinya mencapai 6.598.234.717 rupiah, tahun 2010 turun kembali menjadi 5.594.269.278 rupiah dan pada tahun 2011 sampai 2014 berturut turut naik 8.327.631.816 rupiah,10.620.087.945 rupiah,14.406.092.809 rupiah,26.137.234.620 rupiah.

Berdasarkan uraian di atas penerimaan retribusi di Kabupaten Minahasa Selatan dalam jangka waktu 10 tahun antara tahun 2005-2014 mengalami fluktuasi. Dalam hal ini dengan penerimaan retribusi daerah yang berfluktuasi dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan adanya fenomena diatas timbul pertanyaan apakah ada pengaruh yang nyata dari retribusi terhadap PAD.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain berupa data jadi dalam bentuk publikasi. Data tersebut diperoleh dari sumber, yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Minahasa Selatan yang diperlukan untuk mencari Data target dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah. Periode data penelitian ini adalah runtun waktu mulai tahun 2005-2014. Maksud dan tujuan kenapa dari tahun 2005-2014 karena ingin melihat apakah ada kontribusi dan pengaruh variabel retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tempat penelitian adalah Kabupaten Minahasa Selatan dengan pengambilan data melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk pengambilan data penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data target dan realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2005-2014
- b. Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2005-2014

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kontribusi dan pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, variabel- variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Daerah,
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sedangkan definisi operasional dari masing- masing variabel adalah sebagai berikut:

- 1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ----(Siahaan, 2013).
- 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. ----Mardiasmo (2002:132)

Analisi Rasio Kontribusi

Kontribusi retribusi adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui sumbangan retribusi terhadap total PAD. Dalam mengukur analisa rasio kontribusi peneliti menggunakan suatu rumus. Rumusnya adalah: (3)

$$Pn = \frac{Q}{Q} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

- Keterangan :
- Pn = Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
 - Qx = Realisasi Retribusi Daerah
 - Qy = Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - n = Tahun (periode tertentu)

Regresi Sederhana

Secara umum. analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui [2].

Uji regresi digunakan untuk meramalkan suatu variabel dependen (Y) berdasar satu variabel independen (X) dalam suatu persamaan linier [9].

$$\text{Persamaan liniernya : } Y = a + bX \dots\dots\dots (2)$$

Uji r

Uji r atau uji korelasi digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang dipelajari adalah hubungan yang linier atau garis lurus. Oleh karena itu, uji r ini sering disebut uji korelasi linier. Ukuran korelasi disebut koefisien korelasi disingkat dengan r. Nilai r berkisar antara -1 sampai +1, termasuk 0. Semakin besar nilai r (mendekati angka 1), maka semakin erat hubungan kedua variabel tersebut, sebaliknya semakin kecil nilai r (mendekati 0), maka semakin lemah hubungan kedua variabel tersebut.

Uji r²

Uji r² atau koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai r² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji t

Uji t atau uji signifikansi parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H₀) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_i = 0 \dots\dots\dots (3)$$

Artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (H₁) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_A : b_i \neq 0 \dots\dots\dots (4)$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi

$$P_n = \frac{Q}{Q} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2005} = \frac{1.5 \ .2 \ .2}{3.6 \ .6 \ .1} \times 100 \% = 40,97 \%$$

$$\text{Tahun 2006} = \frac{1.2 \ .2 \ .1}{4.1 \ .5 \ .6} \times 100 \% = 31,12 \%$$

$$\text{Tahun 2007} = \frac{2.5 \ .9 \ .0}{5.5 \ .3 \ .3} \times 100 \% = 45,22 \%$$

$$\text{Tahun 2008} = \frac{1.5 \ .7 \ .5}{4.2 \ .0 \ .9} \times 100 \% = 37,67 \%$$

$$\text{Tahun 2009} = \frac{2.1 \ .3 \ .0}{6.5 \ .2 \ .7} \times 100 \% = 32,51 \%$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{1.1 \ .0 \ .6}{5.5 \ .2 \ .2} \times 100 \% = 20,36 \%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{1.3 \ .2 \ .8}{8.3 \ .6 \ .8} \times 100 \% = 16,79 \%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{7 \ .1 \ .4}{1 \ .6 \ .0 \ .9} \times 100 \% = 7,47 \%$$

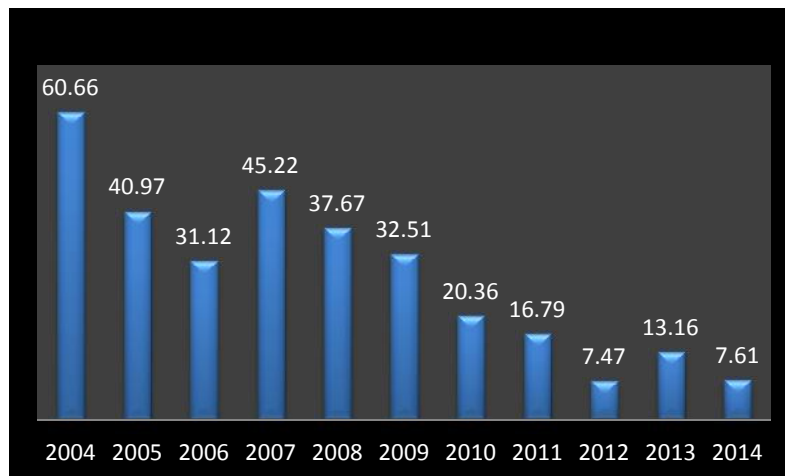
$$\text{Tahun 2013} = \frac{1.8 \ .3 \ .3}{1 \ .4 \ .0 \ .8} \times 100 \% = 13,16 \%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{1.9 \ .2 \ .2}{2 \ .1 \ .2 \ .6} \times 100 \% = 7,61 \%$$

Tabel 3. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Tahun	Realisasi Retribusi	Realisasi PAD	Kontribusi
2005	1.515.291.258	3.697.691.164	40,97 %
2006	1.276.200.109	4.100.530.604	31,12 %
2007	2.517.921.023	5.567.377.399	45,22 %
2008	1.585.707.509	4.209.053.938	37,67 %
2009	2.145.302.036	6.598.234.717	32,51 %
2010	1.139.081.686	5.594.269.278	20,36 %
2011	1.398.222.820	8.327.631.816	16,79 %
2012	794.163.451,00*	10.620.087.945,00	7,47 %
2013	1.896.320.372,00	14.406.092.809,00	13,16 %
2014	1.989.213.244,00	26.137.234.620,00	7,61 %
Rata-rata			25,29 %

Sumber : Data Realisasi retribusi di tahun 2012 adalah hasil dari penambahan 40 % dari tahun sebelumnya.



Grafik Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD per tahun (%)

Dari hasil analisis presentase di atas dapat kita lihat bagaimana kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD di kabupaten Minahasa Selatan pertahunnya. Pada tahun 2005 kontribusinya

mencapai 40,97. Pada tahun 2006 kontribusinya mengalami penurunan 31,12 persen. Tahun 2007 kontribusi naik menjadi 45,22 persen, dan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 berturut-turut kontribusi menurun 37,67 persen, 32,51 persen, 20,36 persen, 16,79 persen, 7,47 persen, 13,16 persen, dan 7,61 persen. Kontribusi Retribusi terhadap PAD yang terkecil ada pada tahun 2012 yaitu sebesar 7,47 persen. Dan rata-rata dari kontribusi dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 25,29 persen.

Uji r

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.118 ^a	.014	-.109	.28526

a. Predictors: (Constant), Retribusi

Dari Tabel 4 Model summary besarnya r adalah 0,118, hal ini menunjukkan hubungan keeratan antara variabel independen retribusi daerah (X) dan variabel dependen PAD (Y) positif tetapi sangat lemah karena nilainya jauh dari 1. Artinya semakin besar nilai variabel independen retribusi daerah (X) maka semakin besar pula nilai variabel dependen PAD (Y).

Uji r²

Dari Tabel 4 Model Summary dapat dijelaskan pula besarnya r² adalah 0,14. Hal ini berarti 1,4 persen variasi dependen PAD (Y) dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen Retribusi Daerah (X) sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor faktor lain diluar model.

Uji t

Tabel 5 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.879	5.933		1.328	.221
	Retribusi	.216	.645	.118	.335	.746

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh t hitung sebesar 0,335 < dari t tabel 2,306. Pada Tabel 5 Coefficient dapat dilihat apakah hasil perhitungan memberikan nilai yang signifikan atau tidak signifikan dengan persyaratan nilai signifikansi yang diterima adalah lebih kecil dari 0,05. Dari kolom signifikansi Retribusi daerah memberikan hasil yang tidak signifikan dikarenakan nilainya signifikansi Retribusi daerah melebihi persyaratan yang ada (0,746 > 0,05). Dari hasil uji t dapat dijelaskan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari Tabel 5 coefficients juga kita bisa menjelaskan persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y=7,879 + 0,216 X$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a). Koefisien sebesar 7,879 menjelaskan tanpa adanya retribusi daerah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,879.
- b). Dari nilai X koefisien sebesar 0,216 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara dua variabel X (retribusi daerah) dan variabel Y (PAD), ini berarti setiap peningkatan retribusi daerah akan mengakibatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya

setiap adanya penambahan 1 nilai pada variabel retribusi maka akan mengakibatkan adanya kenaikan pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,216.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Rata rata retribusi daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 memiliki kontribusi yang sedang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan pertumbuhan retribusi daerah mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan anggaran pertahunnya.
2. Dari hasil regresi diperoleh adanya hubungan positif antara Retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Minahasa Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah, akan diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hasil regresi sederhana yang ada ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saran

1. Agar target retribusi daerah dapat terealisasi dengan baik, aparat dari instansi-instansi terkait perlu membuat strategi supaya potensi dari retribusi itu sendiri dapat tergali dengan maksimal.
2. Diperlukan kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi daerah, di mana perlu diadakannya penyuluhan tentang pentingnya kewajiban membayar retribusi daerah.
3. Diberlakukannya sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar pengumpul atau pemungut retribusi.
4. Kualitas aparat daerah dan pelayanan terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Basuki. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- [2] Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometrika Dasar, Jakarta : Erlangga (Ahli bahasa: Drs.Ah. Sumarno Zain, MBA)
- [3] Halim , Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- [4] Kamaludin, H.R. 2002. Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Daerah. Jakarta: FE UI.
- [5] Koswara. 2000 Otonomi dan Pajak Daerah, PT. Gramedia Widiasara Indonesia.
- [6] Kuncoro, M. 2002 Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta.
- [7] Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah. Yogyakarta : Andi
- [8] Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers : Jakarta
- [9] Trihendradi, C. 2012. Step by Step SPSS 20 Analisis Data Statistik. Yogyakarta : ANDI
- [10] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
- [11] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
- [12] Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004